ANTHOR
Education and Learning Journal
https://anthor.org/index.php/anthor
Email. anthor.Jurnal@gmail.com
E-ISSN: 2963 –198X P-ISSN: 2963–2498 | Halaman: 434 - 442
Volume 5 Nomor 6 Tahun 2026

Integrasi Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Lintas Budaya dalam Memperkuat Identitas Nasional Masyarakat Indonesia

Informasi Naskah

Selfawati[1]
Najamuddin[2]
Firdaus W. Suhaeb[3]
Dalilul Falihin[4]

Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah dan Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia[1,4]
Program Studi Pendidikan Antropologi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia[2]
Program Studi Sosiologi, Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia[3]

selfawati68@sma.belajar.id[1]
najamuddin@unm.ac.id[2]
firdaus.w.suhaeb@unm.ac.id[3]
dalilul.falihin@unm.ac.id[4]

Abstrak

Kemajemukan Indonesia memerlukan pendidikan yang memungkinkan warga mempertahankan identitas budaya sekaligus mengembangkan rasa memiliki sebagai bagian dari bangsa yang sama. Penelitian ini menganalisis bagaimana pendidikan multikultural dan pendidikan lintas budaya dapat diintegrasikan untuk memperkuat identitas nasional masyarakat Indonesia. Kajian menggunakan Systematic Literature Review (SLR) berpedoman pada pelaporan PRISMA 2020 serta sintesis tematik terhadap peta bukti sepuluh studi empiris berfokus pada konteks pendidikan Indonesia periode 2021–2026. Temuan menunjukkan bahwa pendidikan multikultural berperan dalam pengakuan budaya lokal, kesetaraan pedagogis, penguatan nilai Pancasila, dan pembentukan literasi budaya; sementara pendidikan lintas budaya menyediakan pengalaman dialog, persahabatan, kerja sama, serta perjumpaan antarkelompok, termasuk secara digital. Penelitian yang mengukur nasionalisme dan identitas nasional melaporkan hubungan atau perubahan yang positif, tetapi tidak seluruhnya dapat ditafsirkan sebagai bukti kausal. Sintesis menghasilkan kerangka integrasi yang menghubungkan pengakuan keragaman dengan kontak antarbudaya, kompetensi antarbudaya, rasa memiliki yang inklusif, dan identitas nasional. Dukungan guru, iklim institusi, serta relasi setara menjadi syarat penting agar perjumpaan menghasilkan penguatan kebangsaan, bukan prasangka baru. Temuan yang didominasi peserta didik belum dapat digeneralisasikan langsung kepada seluruh masyarakat Indonesia. Integrasi kedua pendekatan direkomendasikan sebagai strategi pendidikan kebangsaan yang menghargai keberagaman, bukan menyeragamkannya.

Kata Kunci:
Pendidikan Multicultural, Pendidikan Lintas Budaya, Integrasi Pendidikan, Identitas Nasional, Masyarakat Indonesia.

Abstract

Indonesia's plural society requires education that enables citizens to sustain cultural identities while developing a shared sense of national belonging. This article examines how multicultural and intercultural education can be integrated to strengthen inclusive Indonesian national identity. A systematic literature review informed by PRISMA 2020 reporting principles was conducted through thematic synthesis of an existing evidence map containing ten empirical studies from Indonesian educational settings published in 2021–2026. The findings suggest complementary functions: multicultural education offers cultural recognition, equitable pedagogy, Pancasila-related values, and cultural literacy, while intercultural education provides opportunities for dialogue, friendship, collaboration, and cross-group encounters, including digitally mediated contact. Studies directly measuring nationalism or national identity report positive associations or changes, although their designs do not consistently establish causality. The synthesis proposes an integrative pathway from recognition of diversity and intercultural encounters to intercultural competence, inclusive belonging, and national identity. Teacher facilitation, institutional support, and equitable group relations appear important for constructive contact. As most available evidence comes from educational populations, the findings cannot be generalized automatically to Indonesian society as a whole. Integrating both educational approaches is therefore recommended as a promising pathway toward shared national identity without cultural homogenization.

Keyword:
Multicultural Education, Intercultural Education, Educational Integration, National Identity, Indonesian Society.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike* 4.0 *International* (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Perkembangan Indonesia terbentuk dari perjumpaan komunitas dengan latar etnis, agama, bahasa, dan tradisi yang beragam. Kenyataan ini bukan sekadar ciri demografis, melainkan bagian dari pembentukan kebudayaan dan pengalaman kewargaan Indonesia. Di satu sisi, perbedaan menyediakan sumber pengetahuan, kreativitas, dan solidaritas sosial; di sisi lain, hubungan antarkelompok dapat diwarnai prasangka atau ketimpangan pengakuan. Pendidikan memegang peran strategis karena nilai yang dipelajari di sekolah,

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

keluarga, perguruan tinggi, dan lingkungan sosial memengaruhi cara individu memandang kelompoknya sendiri maupun sesama warga. Tantangan utamanya bukan memilih antara keberagaman dan persatuan, tetapi membangun persatuan yang memberi tempat setara kepada keragaman. Dalam penelitian mahasiswa lintas wilayah, Rukiyati et al. (2023) menunjukkan bahwa nilai keberagaman dan lingkungan pendidikan berhubungan positif dengan indikator nasionalisme, sehingga keduanya tidak perlu dipahami sebagai orientasi yang saling meniadakan.

Identitas nasional dalam artikel ini dimaknai sebagai rasa memiliki terhadap Indonesia, penerimaan terhadap landasan hidup berbangsa, serta komitmen untuk hidup sebagai warga yang setara tanpa harus menghapus identitas lokal. Rumusan tersebut perlu dibedakan dari nasionalisme yang dalam sejumlah penelitian diukur melalui sikap terhadap simbol, tokoh, atau perilaku kebangsaan. Keterkaitan kedua konstruk tidak berarti keduanya identik. Penelitian Idawati dan Febriyanti (2025), misalnya, secara eksplisit mengukur national identity, sedangkan Setemen et al. (2023) mengukur sikap nasionalisme. Pembeda ini penting agar suatu peningkatan toleransi atau pengetahuan budaya tidak langsung dinyatakan sebagai peningkatan identitas nasional tanpa dasar pengukuran.

Pendidikan multikultural mengembangkan pemahaman terhadap keragaman melalui representasi budaya dalam kurikulum, pengurangan prasangka, perubahan cara membangun pengetahuan, pedagogi yang setara, dan budaya institusi yang memberdayakan. Kerangka lima dimensi Banks (2016) memperlihatkan bahwa pendidikan multikultural tidak cukup dilakukan dengan memperkenalkan jenis pakaian adat, makanan, atau perayaan budaya. Penelitian Suri dan Chandra (2021) pada pendidik anak usia dini di Lampung menemukan strategi yang bergerak dari pengenalan dan pengayaan budaya menuju transformasi dan pembelajaran berbasis masalah. Dengan demikian, nilai budaya lokal dapat menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana perbedaan dilihat, dihargai, dan diperlakukan dalam kehidupan bersama.

Pendidikan lintas budaya melengkapi dimensi tersebut melalui pengalaman langsung atau terfasilitasi bersama orang dari kelompok yang berbeda. Pengetahuan mengenai suatu budaya belum menjamin kemampuan mendengarkan perspektif anggota budaya tersebut, bernegosiasi secara adil, atau bekerja sama dalam kondisi perbedaan. Menurut Pettigrew dan Tropp (2006), kontak antarkelompok secara umum berkaitan dengan penurunan prasangka, walaupun kualitas dan konteks kontak tetap perlu diperhatikan. Logli (2026) pada konteks perguruan tinggi Indonesia menemukan bahwa persahabatan, organisasi mahasiswa, dan kegiatan pelayanan masyarakat dapat mendukung kontak positif; sebaliknya, lemahnya dukungan institusi serta relasi mayoritas–minoritas yang timpang dapat menghambatnya. Perbedaan orientasi ini memperlihatkan mengapa pendidikan multikultural dan pendidikan lintas budaya sebaiknya diintegrasikan, bukan digunakan sebagai istilah yang saling menggantikan.

Bukti mengenai hasil kebangsaan sudah mulai terbentuk melalui beragam jenjang pendidikan. Rukiyati et al. (2023) meneliti 916 mahasiswa dan melaporkan hubungan positif antara nilai keberagaman dan nasionalisme. Setemen et al. (2023) menguji pembelajaran IPS multikultural berbasis blended learning pada 64 siswa sekolah dasar dengan memperhatikan literasi budaya. Idawati dan Febriyanti (2025) menghubungkan pelestarian nilai budaya, penggunaan bahasa Indonesia, serta keterlibatan pendidikan digital dengan identitas nasional pada 350 responden. Prihatmojo et al. (2026) juga menemukan pertumbuhan karakter nasionalisme pada 131 siswa sekolah dasar selama intervensi pendidikan. Meskipun temuan-temuan tersebut relevan, rancangan, indikator, dan satuan analisisnya tidak seragam sehingga tidak dapat langsung digabung menjadi satu ukuran efek.

Kajian terdahulu telah menjelaskan pendidikan multikultural Indonesia dari beragam perspektif. Jayadi et al. (2022) mengidentifikasi tema persatuan dalam keberagaman, kesetaraan, identitas budaya, dan keadilan sosial. Andang et al. (2026) memetakan penelitian pendidikan multikultural, termasuk kecenderungan fokus pada praktik pedagogis dan nilai budaya lokal. Akan tetapi, pemetaan umum tersebut belum dengan sendirinya menjelaskan hubungan antara pengakuan keragaman melalui isi pembelajaran dan pengalaman perjumpaan antarbudaya sebagai dua komponen yang bekerja secara bersama menuju identitas nasional. Selain itu, bukti tentang toleransi dan kompetensi antarbudaya sering dibicarakan berdekatan dengan nasionalisme tanpa pemisahan tegas antara hasil antara dan hasil kebangsaan. Di sinilah letak persoalan utama artikel ini.

Penelitian-penelitian tersebut masih memberikan penekanan yang berbeda, baik pada pengenalan budaya lokal, pengembangan toleransi, pembelajaran multikultural, maupun pengalaman interaksi antarbudaya. Kajian yang telah dilakukan juga belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana pendidikan multikultural dan pendidikan lintas budaya dapat dihubungkan sebagai dua pendekatan yang saling melengkapi dalam membangun identitas nasional. Selain itu, literasi budaya, kompetensi antarbudaya, dan rasa memiliki sebagai bagian dari bangsa Indonesia sering dibahas sebagai hasil pendidikan yang berdiri sendiri, padahal ketiganya dapat dipahami sebagai unsur yang menghubungkan pengakuan terhadap keberagaman dengan

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

pembentukan identitas nasional. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar perlunya kajian integratif, bukan sekadar pengulangan pembahasan mengenai pentingnya pendidikan multikultural atau toleransi. Artikel ini menawarkan Model Integrasi Multikultural–Lintas Budaya untuk Identitas Nasional (IMLB-IN). Model ini menempatkan pendidikan multikultural sebagai landasan pengakuan budaya, kesetaraan, dan nilai kebangsaan, sedangkan pendidikan lintas budaya berperan menyediakan ruang dialog, interaksi, serta kerja sama antarkelompok. Kedua pendekatan tersebut dipertautkan melalui pengembangan literasi budaya, kompetensi antarbudaya, dan rasa memiliki yang inklusif sebagai jalur konseptual menuju penguatan identitas nasional. Dengan demikian, kebaruan artikel terletak pada penyusunan kerangka integrasi yang menjelaskan hubungan antara pengakuan terhadap keberagaman, pengalaman perjumpaan antarbudaya, dan pembentukan identitas nasional tanpa menuntut penghapusan identitas lokal. Model ini merupakan hasil sintesis konseptual dari penelitian terdahulu dan belum diposisikan sebagai hubungan kausal yang telah teruji secara empiris.

Artikel bertujuan menganalisis peran komplementer pendidikan multikultural dan pendidikan lintas budaya dalam penguatan identitas nasional masyarakat Indonesia. Kajian diarahkan pada empat persoalan substantif: bentuk integrasi kedua pendidikan, kontribusinya pada orientasi kebangsaan, mekanisme dan kondisi yang membuat integrasi bermakna, serta implikasinya bagi praktik pendidikan Indonesia. Argumennya ialah bahwa pengakuan terhadap keberagaman menyediakan landasan kognitif dan etis, sedangkan perjumpaan antarkelompok memberi ruang untuk menguji pengakuan tersebut dalam relasi sosial. Hubungan keduanya dengan identitas nasional dibaca melalui literasi budaya, kompetensi antarbudaya, dan rasa memiliki yang inklusif. Artikel menawarkan Model Integrasi Multikultural–Lintas Budaya untuk Identitas Nasional (IMLB-IN) sebagai kesimpulan konseptual, bukan sebagai mekanisme kausal yang telah sepenuhnya teruji.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) dengan pedoman pelaporan PRISMA 2020 (Page et al., 2021). Fokus telaah adalah studi empiris tentang pendidikan multikultural, pendidikan lintas budaya atau antarbudaya, serta hasil yang berhubungan dengan identitas nasional dalam konteks Indonesia. Bahan yang dapat dianalisis dalam penulisan artikel ini ialah peta bukti dari laporan riset mendalam yang memuat sepuluh studi primer terbit 2021–20 Oktober 2026. Literatur teoretis dan tinjauan sebelumnya digunakan sebagai landasan perbandingan, bukan dihitung sebagai studi primer. Penting ditegaskan bahwa laporan sumber tidak menyertakan ekspor pencarian, log deduplikasi, dan hitungan penyaringan seluruh basis data; karena itu, sepuluh studi dilaporkan sebagai korpus bukti yang tersedia, bukan hasil seleksi akhir PRISMA yang dapat diaudit secara lengkap.

Strategi pencarian yang dirumuskan dalam protokol sumber menggabungkan istilah "multicultural education", "intercultural/cross-cultural education", "pendidikan multikultural", dan "pendidikan lintas budaya" dengan "Indonesia/Indonesian" serta "national identity", "nasionalisme", "Pancasila", "citizenship", atau "tolerance". Basis data yang ditargetkan mencakup Scopus, Web of Science, ERIC, DOAJ, SINTA, Google Scholar, dan JSTOR. Kriteria inklusi meliputi penelitian primer berbahasa Indonesia atau Inggris, berlokasi atau relevan dengan konteks pendidikan Indonesia, memiliki data empiris dan metode yang dapat dikenali, serta membahas pendidikan keberagaman berikut identitas kebangsaan atau mekanisme sosial yang terkait. Penelitian di luar rentang tahun, artikel opini, tinjauan tanpa data primer, dan kajian tanpa kaitan substantif dengan pendidikan Indonesia dikecualikan dari korpus utama. Karena data log pencarian tidak tersedia, jumlah artikel yang dikeluarkan pada tiap tahap tidak direkonstruksi atau dikarang.

Ekstraksi temuan memperhatikan penulis, tahun, jenjang atau lingkungan pendidikan, pendekatan studi, karakteristik partisipan, bentuk pendidikan yang dikaji, serta hasil yang diukur. Luaran dipisahkan menjadi hasil kebangsaan langsung (identitas nasional dan nasionalisme) serta luaran antara (toleransi, literasi budaya, kesadaran dan kompetensi antarbudaya, kontak sosial, atau keterlibatan kewargaan). Kualitas metode ditelaah secara sementara menggunakan prinsip Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) 2018 sesuai jenis desain (Hong et al., 2018); penilaian definitif tetap memerlukan pemeriksaan teks lengkap dan keputusan penelaah independen. Analisis dilakukan melalui sintesis tematik lintas penelitian tanpa meta-analisis karena perbedaan rancangan, variabel, dan pengukuran. Kesimpulan membedakan asosiasi, deskripsi pengalaman, dan perubahan intervensi agar tidak memberi makna kausal yang melampaui sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Pendidikan Multikultural dan Pendidikan Lintas Budaya dalam Kehidupan Kebangsaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan multikultural dan pendidikan lintas budaya bekerja pada dua tingkat yang saling membutuhkan. Pendidikan multikultural menyusun dasar pengetahuan dan orientasi etis mengenai keberagaman melalui isi kurikulum, pengetahuan sejarah dan budaya, nilai keadilan,

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

serta kesempatan yang setara dalam kegiatan belajar. Pendidikan lintas budaya menerjemahkan dasar tersebut menjadi pengalaman berinteraksi dengan orang yang memiliki keyakinan, bahasa, atau kebiasaan berbeda. Apabila materi keberagaman hanya disampaikan sebagai hafalan, peserta didik mungkin mengetahui adanya kelompok lain, tetapi belum tentu mampu membangun relasi yang menghormati mereka. Sebaliknya, perjumpaan tanpa pemahaman mengenai perbedaan dan ketidaksetaraan dapat menghasilkan salah tafsir. Integrasi dibutuhkan agar pengetahuan membentuk cara berinteraksi, sementara pengalaman nyata memberi kesempatan menguji dan memperbaiki pengetahuan tersebut (Banks, 2016); (Deardorff, 2006).

Temuan Budirahayu dan Saud (2021) mengenai pembelajaran multikultural di beberapa sekolah di Jawa Timur menempatkan toleransi, harmoni, dan keadilan sosial sebagai bagian dari lingkungan pendidikan yang terintegrasi. Pada pendidikan usia dini, Suri dan Chandra (2021) menunjukkan bahwa pengenalan budaya lokal dapat dikembangkan secara bertahap dari kontribusi dan pengayaan menuju transformasi dan pemecahan masalah. Dua hasil tersebut menyarankan bahwa integrasi bukan kegiatan seremonial sekali waktu, melainkan proses bertingkat: peserta didik mengenal perbedaan, memahami alasan di balik praktik budaya, mempertimbangkan sudut pandang orang lain, dan menggunakan pemahaman itu untuk menyelesaikan persoalan bersama. Hasil ini terutama menjelaskan prasyarat pendidikan multikultural, sehingga tidak tepat dinyatakan sebagai bukti langsung meningkatnya identitas nasional.

Pendidikan lintas budaya memberi pelengkap yang konkret. Pada perguruan tinggi, Logli (2026) menunjukkan bahwa persahabatan lintas latar, organisasi mahasiswa, dan service learning mempertemukan peserta didik melalui tujuan serta pekerjaan bersama. Di sekolah bilingual, Muniroh et al. (2023) menjelaskan pentingnya peran guru untuk membangun kesadaran antarbudaya melalui kegiatan kelas dan budaya sekolah. Kombinasi temuan ini memperjelas bahwa pengakuan terhadap budaya lain akan lebih bermakna apabila dibarengi kesempatan mendengarkan, berunding, dan bekerja sama. Dengan demikian, integrasi kedua pendidikan merupakan pertemuan antara pembelajaran yang merepresentasikan keragaman secara adil dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mengalami relasi antarbudaya yang setara.

Dalam konteks Indonesia, tujuan akhir integrasi tersebut bukan menjadikan semua peserta didik memiliki perilaku budaya yang sama. Keindonesiaan dapat berkembang sebagai identitas bersama justru ketika perbedaan etnis, agama, dan bahasa diperlakukan sebagai bagian yang sah dari kehidupan nasional. Paradigma persatuan dalam keberagaman, kesetaraan, dan keadilan sosial yang diidentifikasi Jayadi et al. (2022) memberikan dasar bahwa identitas nasional perlu dibangun melalui pengakuan timbal balik, bukan penghapusan identitas partikular. Posisi ini juga sejalan dengan teori identitas sosial: seseorang dapat memiliki berbagai kategori keanggotaan yang saling beririsan, termasuk identitas daerah dan identitas bangsa (Tajfel & Turner, 1979).

Pengakuan Budaya Lokal, Pancasila, dan Pembentukan Identitas Nasional Inklusif

Pengakuan terhadap budaya lokal merupakan titik awal penting karena peserta didik mengenal dirinya melalui bahasa keluarga, pengalaman lingkungan, nilai adat, dan praktik keagamaan sehari-hari. Namun, pendidikan multikultural tidak berhenti pada penguatan identitas asal. Proses pembelajaran perlu memperlihatkan bahwa budaya tiap kelompok memiliki kedudukan yang layak dihargai dalam kehidupan Indonesia dan dapat menjadi sumber pertukaran pengetahuan. Suri dan Chandra (2021) memperlihatkan kemungkinan tersebut melalui pembelajaran usia dini berbasis budaya lokal; Sakti et al. (2024), melalui kajian etnopedagogi di Yogyakarta, juga menunjukkan peran kearifan lokal dalam pendidikan karakter. Kedua studi tidak mengukur identitas nasional secara langsung, tetapi memberikan dasar bahwa pengenalan identitas lokal dapat dipertautkan dengan pengembangan sikap terbuka terhadap kelompok lain.

Titik temu budaya lokal dan identitas nasional dapat dijelaskan melalui gagasan Bhinneka Tunggal Ika. Persatuan tidak berarti tidak adanya perbedaan, tetapi kesediaan membangun ikatan kewargaan di tengah perbedaan yang diakui. Dalam proses pendidikan, keterikatan tersebut perlu ditopang pengalaman kesetaraan yang konkret: peserta didik dari budaya minoritas memiliki kesempatan untuk memperkenalkan perspektifnya; mayoritas tidak menjadi satu-satunya ukuran kewajaran; dan perbedaan pendapat dapat dibahas tanpa merendahkan identitas tertentu. Pendidikan multikultural menyumbang kerangka representasi dan keadilan, sedangkan pendidikan lintas budaya membantu mengubah pengakuan itu menjadi hubungan timbal balik. Dengan demikian, identitas nasional inklusif bukan hanya rasa bangga terhadap simbol Indonesia, melainkan juga kesediaan menghormati warga Indonesia yang berbeda.

Keterkaitan antara pelestarian budaya dan identitas nasional memperoleh dukungan kuantitatif dari Idawati dan Febriyanti (2025). Dengan analisis SEM-PLS pada 350 responden, penelitian tersebut mengaitkan pelestarian nilai budaya, penggunaan bahasa Indonesia, dan keterlibatan pendidikan digital secara positif dengan national identity. Pelestarian nilai budaya dilaporkan sebagai prediktor terkuat di antara variabel yang

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

dikaji, sedangkan model menjelaskan 67,2% varians identitas nasional di dalam sampel dan spesifikasi analisisnya. Hasil ini tidak berarti 67,2% identitas seluruh masyarakat Indonesia dihasilkan oleh pendidikan, tetapi menunjukkan bahwa keberlanjutan nilai budaya lokal tidak harus berlawanan dengan keterikatan kebangsaan. Bahasa Indonesia dalam konteks ini dapat dipahami sebagai sarana komunikasi antarkelompok yang mempertemukan keragaman tanpa meniadakan bahasa daerah.

Nilai Pancasila menjadi penghubung normatif antara penghargaan terhadap budaya dan kewajiban terhadap sesama warga. Mudlofir et al. (2021) mengkaji respons 73 mahasiswa dari tiga perguruan tinggi mengenai pendidikan Pancasila yang diintegrasikan dengan aspek kecerdasan emosional dan spiritual. Respons terhadap nilai kebangsaan dinilai positif, disertai penekanan pada pentingnya pembiasaan, keteladanan, dan budaya pendukung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa identitas nasional tidak cukup diperlakukan sebagai pengetahuan deklaratif. Ketika prinsip penghormatan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap warga lain dipraktikkan dalam interaksi, pendidikan Pancasila memiliki peluang menjadi pengalaman bersama, bukan sekadar materi ujian.

Perjumpaan Lintas Budaya sebagai Penguat Solidaritas dan Rasa Memiliki

Perjumpaan lintas budaya merupakan mekanisme penting untuk mempertemukan pengalaman identitas yang berbeda. Interaksi memberi kesempatan mengoreksi prasangka yang terbentuk dari cerita sepihak, membandingkan sudut pandang, dan mengenali kepentingan bersama. Meta-analisis Pettigrew dan Tropp (2006) menunjukkan bahwa kontak antarkelompok pada umumnya berkaitan dengan penurunan prasangka, tetapi relevansi temuan tersebut bagi pendidikan Indonesia perlu dibaca dalam konteks hubungan nyata antarkelompok. Interaksi yang mempermalukan, mengecualikan, atau menempatkan satu kelompok sebagai pihak yang selalu menyesuaikan diri berpotensi menghasilkan pengalaman negatif. Dengan demikian, kegiatan lintas budaya tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau banyaknya kelompok yang hadir; kualitas hubungan dan kesempatan berpartisipasi secara setara lebih menentukan.

Logli (2026) memperlihatkan bagaimana proses tersebut bekerja dalam kehidupan perguruan tinggi Indonesia. Persahabatan mahasiswa dari kelompok berbeda, organisasi, kegiatan pelayanan sosial, serta dorongan otoritas kampus terkait dengan pengalaman kontak positif dan keterlibatan kewargaan. Namun, penelitian juga mencatat bahwa ketegangan mayoritas–minoritas dan dukungan institusi yang kurang memadai dapat menimbulkan pengalaman sebaliknya. Temuan ini memberi implikasi penting: keragaman sosial tidak otomatis menumbuhkan solidaritas kebangsaan. Kampus perlu menyediakan ruang interaksi yang tidak hanya mempertemukan orang berbeda, tetapi juga memungkinkan mereka memiliki tujuan bersama, hak berbicara, serta tanggung jawab yang setara.

Pada lingkungan sekolah, hasil Muniroh et al. (2023) mendukung perlunya fasilitasi guru dalam membentuk kesadaran antarbudaya. Guru dapat mengarahkan peserta didik untuk bertanya sebelum menilai, menjelaskan latar suatu praktik budaya, dan mendengarkan pengalaman kelompok lain sebagai pengetahuan yang sah. Langkah tersebut sesuai dengan model kompetensi antarbudaya Deardorff (2006), yang menempatkan keterbukaan, pengetahuan, keterampilan interpretasi, dan adaptasi sebagai bagian dari perkembangan hubungan lintas budaya. Penelitian Muniroh et al. berbasis informasi dari guru sehingga lebih tepat digunakan untuk menjelaskan praktik pendidikan dan kemungkinan mekanisme, bukan sebagai bukti pengaruh kausal yang terukur terhadap identitas nasional siswa.

Apabila pengalaman tersebut dihubungkan secara reflektif dengan nilai kewargaan, peserta didik dapat memahami bahwa kerja sama dengan kelompok lain bukan sekadar keterampilan sosial individual, tetapi praktik menjadi warga Indonesia. Contohnya, tugas kelompok yang mempertemukan peserta didik dari latar agama atau bahasa berbeda dapat diarahkan pada masalah bersama, seperti lingkungan sekolah, akses fasilitas publik, atau pelestarian budaya setempat. Pada tahap refleksi, guru mengaitkan pengalaman bekerja sama dengan prinsip kesetaraan, tanggung jawab, dan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh ini merupakan rekomendasi pedagogis berdasarkan pola studi Logli (2026) dan Muniroh et al. (2023), bukan kegiatan yang telah terbukti memberikan efek tertentu pada seluruh sekolah Indonesia.

Hubungan Literasi Budaya, Nasionalisme, dan Identitas Nasional

Literasi budaya dan kompetensi antarbudaya perlu ditempatkan sebagai jembatan, bukan disamakan dengan identitas nasional. Literasi budaya membantu individu memahami makna praktik budaya serta menafsirkan perbedaan dalam konteks sejarah dan sosial. Kompetensi antarbudaya menambahkan kemampuan berkomunikasi dan menyesuaikan diri secara tepat dalam interaksi. Keduanya berpotensi menghasilkan penerimaan, empati, dan rasa memiliki yang tidak mengecualikan kelompok lain. Namun, pengetahuan tentang budaya tidak identik dengan keterikatan sebagai bangsa, sama halnya dengan toleransi yang belum tentu menandakan adanya partisipasi atau komitmen kewargaan. Kerangka Deardorff (2006) berguna untuk

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

menjelaskan kapasitas antarbudaya, sedangkan hubungan kapasitas tersebut dengan identitas nasional merupakan inferensi integratif yang masih perlu diuji secara langsung.

Penelitian Rukiyati et al. (2023) memberi dukungan empiris penting pada hubungan keragaman dan nasionalisme. Pada 916 mahasiswa dari sejumlah wilayah, nilai keragaman dan lingkungan pendidikan dilaporkan berhubungan positif dengan pengetahuan serta sikap nasionalisme, sementara kondisi lingkungan juga terkait dengan perilaku nasionalisme. Temuan ini menentang anggapan bahwa semakin kuat penghargaan terhadap perbedaan maka semakin lemah orientasi kebangsaan. Meski demikian, pendekatan survei dan penggunaan sampel nonprobabilistik tidak cukup untuk menyatakan bahwa pendidikan keberagaman telah menyebabkan peningkatan identitas nasional di seluruh populasi mahasiswa, apalagi masyarakat Indonesia.

Setemen et al. (2023) memberikan sudut pandang dari intervensi pembelajaran. Penelitian kuasi-eksperimental terhadap 64 siswa kelas V, terdiri atas 32 siswa kelompok eksperimen dan 32 kontrol, menelaah pembelajaran multikultural dalam IPS berbasis blended learning serta tingkat literasi budaya terkait sikap nasionalisme. Temuan positifnya memperlihatkan kemungkinan bahwa penguatan materi dan literasi budaya secara bersama berkaitan dengan orientasi kebangsaan siswa. Akan tetapi, desain kelompok nonekuivalen dengan pengukuran pascaintervensi tidak menghilangkan kemungkinan perbedaan awal antarkelompok. Selain itu, penelitian tersebut tidak menguji seluruh jalur pendidikan lintas budaya, kompetensi antarbudaya, rasa memiliki, dan identitas nasional sebagai satu model sebab-akibat.

Prihatmojo et al. (2026) melengkapi bukti melalui pengamatan pertumbuhan karakter nasionalisme pada 131 siswa sekolah dasar di Yogyakarta selama empat sesi pendidikan menggunakan latent growth modeling. Indikator yang diteliti meliputi aspek simbol nasional, tokoh nasional, dan penghargaan terhadap keragaman budaya. Pertumbuhan yang dilaporkan menunjukkan bahwa orientasi kebangsaan dapat berkembang melalui pengalaman pembelajaran yang dirancang, dengan lintasan perubahan yang tidak sama pada semua siswa. Hasil tersebut lebih tepat dipahami sebagai bukti perubahan karakter nasionalisme dalam konteks intervensi tertentu; temuan itu belum menetapkan besarnya kontribusi terpisah pendidikan multikultural dan pendidikan lintas budaya, atau keterwakilan seluruh anak Indonesia.

Jika keempat temuan kuantitatif tersebut dipertemukan dengan penelitian kualitatif tentang pengalaman antarbudaya, terbentuk argumen yang lebih spesifik. Konten pendidikan multikultural dan pelestarian budaya berkaitan dengan pengenalan identitas dan nilai kewargaan; kontak lintas budaya menyediakan kesempatan mengembangkan kompetensi interaksi; nasionalisme atau identitas nasional menjadi kemungkinan hasil lebih jauh ketika keduanya dihubungkan oleh rasa memiliki yang inklusif. Hasil Idawati dan Febriyanti (2025) menguatkan kaitan pelestarian budaya dengan national identity yang diukur secara eksplisit, sedangkan Logli (2026) menjelaskan prasyarat sosial kontak yang bermakna. Keterhubungan lintas studi tersebut merupakan hasil penalaran sintesis, bukan bukti bahwa mediator sudah dibuktikan dengan analisis mediasi dalam satu studi.

Penerapan Integrasi dari Pendidikan Formal ke Kehidupan Masyarakat Indonesia

Integrasi kedua pendekatan perlu dipahami sebagai proses pendidikan yang berkelanjutan sejak usia dini. Pada jenjang PAUD, pengenalan budaya setempat dan budaya lain dapat dikembangkan melalui cerita, permainan kooperatif, dan kegiatan yang memberi ruang kepada pengalaman keluarga peserta didik. Temuan Suri dan Chandra (2021) di Lampung menunjukkan pentingnya strategi guru berbasis nilai budaya lokal, sedangkan Sakti et al. (2024) memperlihatkan kegunaan kearifan lokal dalam pendidikan karakter prasekolah. Pada tahap ini, target yang realistis adalah berkembangnya penghargaan, kebiasaan mendengarkan, dan sikap adil terhadap teman. Penanaman nilai kewargaan dilakukan secara sesuai usia, bukan melalui tuntutan identitas nasional abstrak yang belum mampu dijelaskan oleh anak.

Pada jenjang sekolah dasar dan menengah, representasi budaya perlu disambungkan dengan kegiatan bersama lintas kelompok. Pembelajaran IPS, bahasa, sejarah, dan pendidikan Pancasila dapat mengaitkan pengalaman budaya peserta didik dengan persoalan publik yang mereka hadapi bersama. Bukti Setemen et al. (2023) menunjukkan potensi pembelajaran IPS multikultural berbasis bauran, sementara Budirahayu dan Saud (2021) menekankan integrasi nilai toleransi, harmoni, dan keadilan sosial di lingkungan sekolah. Bentuk praktisnya dapat berupa pengkajian sejarah lokal dari beberapa perspektif, kerja kelompok atas masalah lingkungan, atau pertukaran hasil penelitian sederhana antarsekolah dari daerah berbeda. Hasilnya perlu dinilai bukan hanya dari pengetahuan kebudayaan, melainkan juga dari cara siswa memperlakukan anggota kelompok dan menghubungkan kerja sama mereka dengan tanggung jawab sebagai warga Indonesia.

Di pendidikan tinggi, ruang integrasi meluas ke organisasi, kegiatan sukarela, pengabdian masyarakat, dan kolaborasi mahasiswa lintas daerah. Pengalaman yang dibahas Logli (2026) menunjukkan pentingnya persahabatan serta keterlibatan bersama sebagai sumber kontak positif. Sementara itu, Mudlofir et al. (2021)

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

menggarisbawahi bahwa pendidikan Pancasila memerlukan pembiasaan dan keteladanan untuk menjadi orientasi yang hidup. Dua temuan ini dapat dijembatani melalui proyek sosial yang menggabungkan diskusi nilai kewargaan dengan tindakan bersama dalam masyarakat. Mahasiswa tidak hanya mempelajari Pancasila sebagai konsep, tetapi menguji maknanya saat merencanakan pekerjaan dengan orang yang memiliki latar dan kepentingan berbeda.

Pemanfaatan teknologi memungkinkan perjumpaan lintas budaya melampaui batas geografis negara kepulauan. Suharno (2024) menggambarkan konferensi komunitas multikultural secara virtual di sekolah-sekolah Yogyakarta yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran, pemahaman, dan perilaku kolaboratif. Setemen et al. (2023) juga menunjukkan relevansi blended learning, sementara Idawati dan Febriyanti (2025) mengaitkan keterlibatan pendidikan digital dengan identitas nasional. Ketiga studi tidak membuktikan bahwa penggunaan perangkat digital semata meningkatkan nasionalisme. Potensi penguatan kebangsaan terletak pada kualitas dialog, tujuan proyek, kesempatan saling mengenal, pendampingan guru, serta refleksi mengenai apa yang mempertemukan peserta dari daerah berbeda.

Judul artikel ini menunjuk identitas nasional masyarakat Indonesia, bukan hanya identitas siswa. Karena itu, pendidikan perlu dilihat sebagai jembatan antara lembaga dan ruang sosial yang lebih luas: kegiatan sekolah dapat melibatkan keluarga, komunitas budaya, pelaku seni, serta lembaga kemasyarakatan. Kerja kolaboratif untuk mendokumentasikan sejarah lingkungan, membahas konflik stereotip, atau menjaga warisan budaya dapat mempertemukan warga dengan pengalaman berbeda. Akan tetapi, perlu dibedakan usulan penerapan tersebut dari temuan empiris yang dianalisis: mayoritas penelitian dalam korpus berfokus pada sekolah dan perguruan tinggi. Hubungan nyata integrasi kedua pendidikan dengan identitas nasional seluruh masyarakat, termasuk warga di luar pendidikan formal, masih memerlukan penelitian khusus.

Kerangka Integrasi untuk Memperkuat Identitas Nasional dan Tantangan Penerapannya

Berangkat dari temuan lintas studi, artikel ini menawarkan Model Integrasi Multikultural–Lintas Budaya untuk Identitas Nasional (IMLB-IN). Kerangka tersebut menempatkan pendidikan multikultural sebagai dasar representasi budaya, pembacaan kritis keberagaman, kesetaraan pedagogis, dan nilai Pancasila. Pendidikan lintas budaya melengkapinya melalui kontak, dialog, pertukaran perspektif, dan kerja sama antarkelompok. Interaksi keduanya diperkirakan membentuk literasi budaya, kompetensi antarbudaya, dan kemampuan memahami sudut pandang orang lain. Ketika kapasitas ini disertai pengalaman diperlakukan sebagai warga yang setara, dapat tumbuh rasa memiliki yang inklusif dan komitmen pada komunitas nasional. Model ini bersifat konseptual; tak satu pun dari sepuluh studi menguji seluruh komponennya sekaligus dalam satu rancangan mediasi kausal.

Kesinambungan antarkomponen menjadi aspek kunci. Guru dapat mengawali pembelajaran dengan representasi budaya yang adil, mempertemukan peserta didik dalam dialog yang terarah, mengajak mereka merefleksikan prasangka, menugaskan kerja sama pada persoalan bersama, kemudian menghubungkan pengalaman tersebut dengan nilai kewargaan Indonesia. Urutan representasi–perjumpaan–refleksi–kolaborasi–pemaknaan kebangsaan tidak dimaksudkan sebagai prosedur tunggal yang wajib diikuti semua kelas; ia merupakan pola praktis yang diturunkan dari strategi transformasional Suri dan Chandra (2021), pendidikan kompetensi antarbudaya Muniroh et al. (2023), kontak positif Logli (2026), serta pembelajaran digital Suharno (2024). Syarat utamanya adalah pengalaman belajar saling melengkapi, bukan berjalan sebagai program terpisah yang tidak pernah dipertemukan.

Penerapan integrasi menghadapi tantangan ketimpangan relasi antarkelompok. Kelompok mayoritas kadang lebih leluasa mendefinisikan identitas bersama, sedangkan kelompok yang lebih kecil perlu berulang kali menjelaskan keberadaannya. Temuan Logli (2026) mengingatkan bahwa kontak tanpa dukungan kelembagaan dapat memunculkan ketegangan, bukan kedekatan. Penguatan identitas nasional karenanya harus memberi ruang aman untuk menyampaikan perbedaan, mekanisme menangani diskriminasi, dan partisipasi yang benar-benar setara. Pendidikan tidak semestinya meminta peserta didik meninggalkan identitas lokal agar dianggap nasionalis; yang perlu dikembangkan adalah kesadaran bahwa hak, kewajiban, dan martabat warga berlaku melintasi batas budaya.

Tantangan lain muncul di ruang digital. Pertukaran virtual dapat memperluas jejaring lintas pulau, tetapi juga menghadapi kesenjangan akses, perbedaan penguasaan bahasa, dan kemungkinan penguatan stereotip jika dialog tidak difasilitasi. Bukti dari Suharno (2024) menunjukkan potensi perjumpaan virtual, sedangkan Setemen et al. (2023) mengilustrasikan pentingnya desain pembelajaran. Implikasi yang dapat ditarik bukan memperbanyak pertemuan daring tanpa arah, melainkan merancang kegiatan yang memiliki tujuan kolaboratif, aturan interaksi, serta sesi refleksi. Penilaian keberhasilan sebaiknya mempertimbangkan kualitas hubungan, keberanian mengoreksi prasangka, dan rasa memiliki sebagai sesama warga, di samping capaian pengetahuan

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

budaya.

Di tingkat kebijakan, integrasi multikultural dan lintas budaya dapat diterapkan lintas mata pelajaran serta kegiatan sekolah, bukan dibebankan pada satu materi seremonial. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan kerangka umum pendidikan nasional; standar kompetensi lulusan terbaru dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 memuat dimensi kewargaan, kolaborasi, komunikasi, dan penalaran kritis sebagai bagian dari delapan dimensi profil lulusan. Pembaruan standar proses melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2026 serta pengaturan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dalam Nomor 6 Tahun 2026 menyediakan konteks bagi praktik belajar yang inklusif. Implikasi konseptual dari hasil penelitian adalah bahwa capaian kewargaan tidak hanya dinilai melalui penguasaan konsep kebangsaan, tetapi juga melalui kemampuan hidup dan bekerja bersama di tengah keragaman.

Pola temuan yang tersedia memberi dukungan pada arah integrasi, sekaligus menetapkan batas kesimpulan. Beberapa penelitian mengukur nasionalisme atau identitas nasional secara langsung, tetapi sebagian yang lain hanya menunjukkan toleransi, pengalaman kontak, atau kompetensi antarbudaya. Bukti survei tidak setara dengan bukti perubahan intervensi; penelitian satu sekolah atau kampus juga tidak merepresentasikan masyarakat Indonesia secara nasional. Oleh karena itu, IMLB-IN perlu dibaca sebagai penjelasan konseptual yang layak diuji, bukan formula yang pasti berlaku di semua daerah. Penelitian lanjutan dapat menguji apakah kelas yang memadukan kurikulum multikultural dan perjumpaan antarbudaya menunjukkan perubahan identitas nasional yang lebih bertahan dibanding kelas yang hanya menekankan satu pendekatan, termasuk melalui pengukuran berulang dan wilayah yang beragam.

Tabel 1. Arah kontribusi temuan empiris terhadap penguatan identitas nasional Indonesia

Aspek integrasi	Penelitian utama	Makna temuan bagi identitas nasional
Kurikulum dan budaya lokal	Suri & Chandra (2021); Budirahayu & Saud (2021)	Pengakuan budaya, kesetaraan, toleransi dan keadilan sosial sebagai landasan pendidikan
Kontak dan kompetensi antarbudaya	Muniroh et al. (2023); Logli (2026)	Dialog, dukungan guru/institusi dan interaksi bermakna; belum mengukur identitas nasional langsung
Kebangsaan dan Pancasila	Mudlofir et al. (2021); Rukiyati et al. (2023)	Respons nilai Pancasila dan hubungan positif nilai keragaman dengan nasionalisme
Pembelajaran dan karakter nasionalisme	Setemen et al. (2023); Prihatmojo et al. (2026)	Sikap atau perubahan karakter nasionalisme pada konteks intervensi pendidikan tertentu
Identitas nasional dan kanal digital	Idawati & Febriyanti (2025); Suharno (2024)	Hubungan budaya/bahasa/digital dengan identitas nasional; ruang virtual untuk pengalaman antarbudaya

KESIMPULAN

Integrasi pendidikan multikultural dan pendidikan lintas budaya merupakan pendekatan yang berpotensi memperkuat identitas nasional masyarakat Indonesia melalui dua kontribusi berbeda yang saling terkait. Pendidikan multikultural menegaskan bahwa budaya lokal, kesetaraan, nilai Pancasila, dan keberagaman warga merupakan bagian sah dari kehidupan kebangsaan. Pendidikan lintas budaya memberi pengalaman untuk menjalankan pengakuan itu melalui perjumpaan, dialog, kerja sama, serta refleksi antarkelompok. Bukti yang tersedia memperlihatkan hubungan positif antara nilai keberagaman, pelestarian budaya, literasi budaya, beberapa intervensi pendidikan, dan indikator nasionalisme atau identitas nasional. Studi tentang interaksi antarbudaya membantu menjelaskan kondisi sosial yang mungkin mendukung hubungan tersebut, tetapi tidak seluruhnya mengukur identitas nasional secara langsung.

Model IMLB-IN yang dirumuskan dalam artikel ini menempatkan literasi budaya, kompetensi antarbudaya, dan rasa memiliki yang inklusif sebagai jembatan konseptual antara pendidikan keberagaman dengan orientasi kebangsaan. Penguatan identitas nasional karena itu sebaiknya tidak bertumpu pada penyeragaman, melainkan pada kemampuan warga mengakui identitas lokal sekaligus menerima kewargaan bersama. Guru, institusi pendidikan, dan lingkungan sosial berperan memastikan kontak berlangsung setara, aman, dan bermakna. Karena sebagian besar bukti berasal dari peserta didik dan institusi pendidikan, implikasinya bagi seluruh masyarakat Indonesia perlu diuji lebih lanjut. Temuan mendukung pengembangan pembelajaran yang memadukan representasi budaya, pengalaman lintas kelompok, kolaborasi, dan pemaknaan Pancasila, dengan evaluasi jangka panjang terhadap identitas nasional inklusif.

REFERENSI

Andang, Sadat, A., Sapiruddin, Agustinasari, Sudarsana, I. P. E., Ferdiansyah, Syakur, A. A., & Noge, M. D.

e-ISSN: 2963 – 198X
p-ISSN: 2963 – 2498

(2026). Multicultural education in Indonesia: A systematic review and bibliometric analysis. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*. https://doi.org/10.66815/ejecs/2911

Banks, J. A. (2016). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (6th ed.). Routledge.

Budirahayu, T., & Saud, M. (2021). Proposing an integrated multiculturalism learning system: A study from Indonesian schools. *The Asia-Pacific Education Researcher, 30*, 141–152. https://doi.org/10.1007/s40299-020-00521-1

Deardorff, D. K. (2006). Identification and assessment of intercultural competence as a student outcome of internationalization. *Journal of Studies in International Education, 10*(3), 241–266. https://doi.org/10.1177/1028315306287002

Hong, Q. N., Pluye, P., Fàbregues, S., Bartlett, G., Boardman, F., Cargo, M., Dagenais, P., Gagnon, M.-P., Griffiths, F., Nicolau, B., O'Cathain, A., Rousseau, M.-C., & Vedel, I. (2018). The Mixed Methods Appraisal Tool (MMAT) version 2018 for information professionals and researchers. *Education for Information, 34*, 285–291. https://doi.org/10.3233/EFI-180221

Idawati, I., & Febriyanti, F. (2025). Indonesian language and culture as pillars of national identity in the digital education era. *IJORER: International Journal of Recent Educational Research, 6*(6), 2112–2119. https://doi.org/10.46245/ijorer.v6i6.1168

Jayadi, K., Abduh, A., & Basri, M. (2022). A meta-analysis of multicultural education paradigm in Indonesia. *Heliyon, 8*(1), e08828. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828

Logli, C. (2026). If you don't know, you cannot love: Intercultural contact theory in Indonesian higher education. *Journal of International Students, 16*(7), 189–208. https://doi.org/10.32674/8qmh4m39

Mudlofir, A., Huda, H., & Sultoni, A. (2021). Nationalism and Pancasila education within Indonesian Islamic and national universities: Mapping students' responses to the integration of spiritual and emotional intelligence-based education. *Journal of Indonesian Islam, 15*(2), 387–408. https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.387-408

Muniroh, S., Jamil, N. L., Jundan, H., & Soseco, T. (2023). Nurturing students' intercultural competence in a bilingual school: Teachers' knowledge and practice in character education. *KnE Social Sciences*, 243–255. https://doi.org/10.18502/kss.v8i7.13254

Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., & Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology, 90*(5), 751–783. https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751

Prihatmojo, A., Sartono, E. K. E., Wibawa, L., Ardiansyah, A. R., Elmiati, E., Maharromiyati, Purwandari, S., Al Fuad, Z., Hartono, D. P., Yarid, H., & Susanti, E. (2026). Investigating the growth of nationalism character in Indonesian elementary school students: A case study. *Journal of Ethnic and Cultural Studies, 13*(1), 166–184. https://doi.org/10.29333/ejecs/2703

Rukiyati, R., Hanum, F., & Purwastuti, L. A. (2023). Excellence of the diversity value and the educational environment on student nationalism. *Cakrawala Pendidikan, 42*(2), 364–379. https://doi.org/10.21831/cp.v42i2.55797

Sakti, S. A., Endraswara, S., & Rohman, A. (2024). Revitalizing local wisdom within character education through ethnopedagogy approach: A case study on a preschool in Yogyakarta. *Heliyon, 10*(10), e31370. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31370

Setemen, K., Widiana, I. W., & Antara, I. G. W. S. (2023). Multicultural learning based on blended learning in social studies and the impact on nationalism attitude viewed from students' cultural literacy level. *Nurture, 17*(3), 314–324. https://doi.org/10.55951/nurture.v17i3.337

Suharno, S. (2024). Implementation of virtual multicultural community conferences for school-based young generation in Yogyakarta. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 21*(1), 143–150. https://doi.org/10.21831/jc.v21i1.60329

Suri, D., & Chandra, D. (2021). Teacher's strategy for implementing multiculturalism education based on local cultural values and character building for early childhood education. *Journal of Ethnic and Cultural Studies, 8*(4), 271–285. https://doi.org/10.29333/ejecs/937

Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of inter-group conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), *The social psychology of inter-group relations* (pp. 33–47). Brooks/Cole.